



**STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA
BERBASIS MASYARAKAT OLEH BPBD
KABUPATEN MALANG**
(Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh:

ALFIAN RIZKY F

NIM. 125030107111115



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**



MOTTO

Man Jadda Wajada

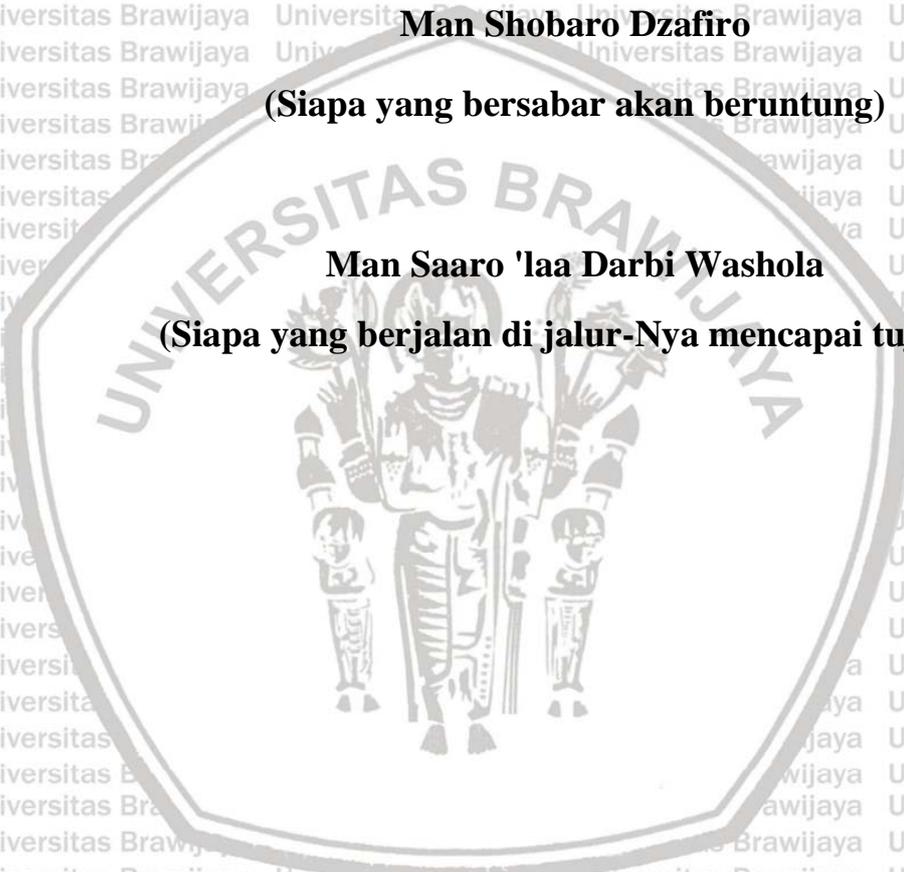
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

Man Shobaro Dzafiro

(Siapa yang bersabar akan beruntung)

Man Saaro 'laa Darbi Washola

(Siapa yang berjalan di jalur-Nya mencapai tujuan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau

berikan keada Hamba. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan

Rasullah Muhammad SAW.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada

Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta

kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan

selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi

langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini

belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku

termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu

menasehatiku menjadi lebih baik,

Terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah...

My Brother's

Untuk kakak, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama keluarga,

walaupun dulu kita sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak

akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa selama ini, Maaf belum bisa menjadi

panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

Dosen dan Guru

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yg sangat berarti

yang telah Ibu / bapak berikan kepada saya

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Studi Kecamatan
Ngantang Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Alfian Rizki F

NIM : 125030107111115

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 1 juli 2019

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

NIP. 19730713 200604 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Admisnistrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 juli 2019
Jam : 10.00-11.00
Skripsi atas nama : Alfian Rizki Ferdiansyah
Judul : Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Malang (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota



Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19450917 197412 2 00

Anggota



Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP. 19860716 201404

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul “**Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang)**” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 1 Juli 2019

Mahasiswa



Alfian Rizki Ferdiansyah
NIM. 12503010711111

RINGKASAN

Alfian Rizki Ferdiansyah, 2019. **Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Malang (Studi di desa Pandansari Kecamatan Ngantang)**. Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Administrasi, Universitas Brawijaya, Dosen Pembimbing Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si.

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau Community Based Disaster Preparedness (CBDP) adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan faktor penghambatnya di desa Pandansari kecamatan Ngantang.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggara program penanggulangan bencana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis data penelitian kualitatif menurut miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat selama ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, dimana pelaksanaan program telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Malang. Kendala yang dihadapi oleh pihak internal dalam evaluasi kebijakan penanggulangan bencana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yakni: 1) Perbedaan posisi dalam struktur organisasi dalam dinas menyebabkan koordinasi antar dinas/instansi menjadi lama 2) Adanya keterbatasan sarana dan prasarana. 3) Kondisi penduduk terkait dengan usia dan pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk. 4) Kurangnya kesadaran sebaigian masyarakat terhadap tanggap bencana 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan bencana pada wilayah rawan bencana.

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu: 1) upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana, 2) Diharapkan dinas yang terkait selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran sebaigian masyarakat terhadap tanggap bencana, 3) Penetapan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana, 4) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan bencana, 5) Komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus secara maksimal dilakukan.

Kata kunci : Strategi, Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Malang.

SUMMARY

Alfian Rizki Ferdiansyah, 2019. **Community Based Disaster Management Strategy by BPBD Malang Regency (Study in Pandansari village, Ngantang District)**. Thesis, public administration department, administrative science, Brawijaya University. Supervisor Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Sd.

Community Based Disaster Preparedness (CBDP) is a community capacity empowerment program to take initiative actions in reducing the impact of disasters that occur in their neighborhoods. The purpose of this study was to find out, describe and inhibit factors in Pandansari village, Ngantang sub-district.

this research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study are documentation, observation, and interviews as a tool for data collection carried out to parties directly related to the organizers of disaster management programs. Data analysis used in the research is qualitative research data analysis according to miles and Huberman.

The results of this study indicate that the community-based disaster management strategy so far can run in accordance with the provisions, where the implementation of the program has been carried out in accordance with procedures established by the BPBD Malang Regency. Constraints faced by internal parties in the evaluation of disaster management policies in the implementation of disaster management are: 1) Differences in the position in the organizational structure in the agency cause coordination between agencies / agencies to be long 2) There are limitations on facilities and infrastructure. 3) The condition of the population is related to age and occupation owned by the population. 4) Lack of awareness among communities of disaster response 5) Lack of public awareness of the importance of disaster management in disaster-prone areas.

The suggestions that can be given from this research are: 1) efforts to remind facilities and infrastructure, 2) It is hoped that the relevant agencies will always strive to increase community awareness of disaster response, 3) Budgeting for the implementation of post-disaster rehabilitation-reconstruction, 4) Increasing public awareness of the importance of disaster management, 5) Government communication with the community must be maximally carried out.

Keywords : Strategy, Disaster management, Malang Regency BPBD

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Malang (Studi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)*”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir kolektif yang menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan.

7. Bapak Drs. Bambang Istiawan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta seluruh staff dinas yang bersangkutan yang sangat membantu penulis dalam pengambilan data.

8. Bapak Drs. Suwondo Kepala desa Pandansari serta warga desa Pandansari Kecamatan Ngantang yang bersedia menjadi penelitian dalam skripsi penulis.

9. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayah saya Ma'ruf, Ibu saya Lailatul Munawaroh dan kakak saya Reza Fathoni yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi serta dorongan yang bagi sangat berarti penulis.

10. Keluarga besar KDW 56 dan keluarga besa AMC yang membantu kelancaran, memotivasi dan semangat selama menyusun skripsi ini

11. Seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balas atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Tanpa menutup diri dari kesalahan dan ketidaktelitian, penulis mengakui masih banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu Saya selaku penulis mengharapkan kritik serta saran untuk proses belajar menjadi lebih baik. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO **i**

HALAMAN PERSEMBAHAN **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **iv**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **v**

RINGKASAN..... **iv**

SUMMARY **vii**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **x**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR/BAGAN **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **6**

D. Kontribusi Penelitian **6**

E. Sistematika Pembahasan **7**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik..... **9**

 1. Definisi Kebijakan Publik..... **9**

 2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik..... **11**

B. Implementasi Kebijakan Publik..... **13**

 1. Definisi Kebijakan Publik **13**

 2. Proses Implementasi Kebijakan Publik..... **15**

C. Evaluasi Kebijakan **17**

 1. Konsep Evaluasi Kebijakan **17**

 2. Model Evaluasi Kebijakan Publik..... **19**

D. Definisi Strategi **22**

 1. Pengertian Strategi **22**

 2. Tingkat – Tingkat Strategi **23**

 3. Tipe – Tipe Strategi..... **26**

 4. Manajemen Strategi **27**

 5. Evaluasi Strategi **34**

E. Manajemen Bencana **40**

 1. Definisi Manajemen Bencana **40**

 2. Penyelenggaraan Manajemen Bencana..... **44**

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian **47**

B. Fokus Penelitian..... **48**

C. Lokasi Dan Situs Penelitian..... **49**

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian **49**

E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	52
G. Keabsahan Data.....	53
H. Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	57
1. Gambaran umum kabupaten Malang.....	57
2. Gambaran umum BPBD kabupaten Malang.....	62
3. Gambaran umum desa Pandansari.....	67
B. Penyajian Data fokus.....	80
1. Strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh pemerintah kabupaten Malang.....	80
a. Strategi organisasi.....	80
b. Strategi program.....	83
c. Strategi pendukung sumber daya manusia.....	86
d. Strategi kelembagaan.....	94
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.....	97
a. Faktor pendukung.....	97
b. Faktor Penghambat.....	98
C. Pembahasan.....	99
1. Strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh pemerintah kabupaten Malang.....	99
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.....	105

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas wilayah kecamatan di kabupaten Malang.....	59
Tabel 2 Jumlah penduduk kecamatan Ngantang menurut jenis kelamin	61
Tabel 3 Jumlah penduduk desa pandasari menurut jenis kelamin tahun 2014.....	62
Tabel 4 Jumlah penduduk.....	71



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 1 Analisis model interaktif	55
Gambar 2 Wilayah administratif kabupaten Malang	58
Gambar 3 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62
Gambar 4 Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67
Gambar 5 Peta wilayah desa pandansari	68
Gambar 6 Grafik data demografi berdasar pekerjaan	72
Gambar 7 Sistem peringatan dini berbasis masyarakat	81
Gambar 8 Jalur evakuasi	89





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut. Tentu sebaiknya tidak dipisah-pisahkan keberadaannya, sehingga bencana itu terjadi dan upaya-upaya peredaman risiko itu dilakukan. Menurut Nikelsen (2009), bencana dapat dikurangi apabila masyarakat dan sistem sosial yang lebih tinggi yang bekerja padanya tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola ancaman yang terjadi padanya. Ancaman, pemicu dan kerentanan, masing-masing tidak hanya bersifat tunggal, tetapi dapat hadir secara jamak, baik seri maupun paralel, sehingga disebut bencana kompleks. Hal yang sama juga terjadi pada konflik. Konflik antar komunitas maupun unit sosial di atasnya terjadi apabila secara langsung maupun tidak langsung ada upaya saling mengambil aset-aset atau mengganggu proses mengakses aset penghidupan tersebut di atas.

Pengambilan aset maupun gangguan atas akses penghidupan dapat dipicu oleh permasalahan lingkungan. Aktivitas komunitas maupun unit sosial di atasnya yang memunculkan permasalahan lingkungan sudah menjadi ancaman bagi pihak lain apabila aset-aset penghidupannya dan akses

penghidupannya terganggu. Bencana dalam kenyataan keseharian dapat menyebabkan: 1) Berubahnya pola-pola kehidupan dari kondisi normal; 2) Merugikan harta, benda dan jiwa manusia; 3) Merusak struktur sosial komunitas; 4) Memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi/komunitas.

Penyebab terjadinya bencana dapat disebabkan oleh tiga faktor. Faktor tersebut yaitu : 1) bencana dapat terjadi karena fenomena alam seperti Tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, penyakit pada tanaman atau hewan peliharaan, dan seterusnya, 2) bencana dapat terjadi karena perbuatan manusia terhadap lingkungannya, seperti banjir, tanah longsor, wabah penyebab virus, dan seterusnya, dan 3) bencana dapat terjadi akibat tindakan manusia atau hubungannya terhadap lingkungan sosialnya, seperti konflik agama, kerusuhan politik yang kacau balau, dan konflik suku bangsa (Susanto, 2006). Pengesahan Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah RI tanggal 26 April 2007 telah membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana di Indonesia.

Paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif dalam menangani bencana sekarang diubah menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi) sehingga risikonya dapat dikurangi. Undang-undang tentang penanggulangan bencana tersebut juga mensyaratkan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terdesentralisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang seluasluasnya baik mulai sejak tahap awal program (identifikasi, analisis, penerapan rencana kerja, monitor dan evaluasi) sampai ke tahap akhir dimana

program sudah diserahterimakan sepenuhnya kepada masyarakat lokal.

Berbicara tentang bencana pada dasarnya membicarakan lima (5) hal sekaligus, yaitu penyebab bencana dan kerentanan (faktor alam dan manusia), dampak bencana (kerusakan lingkungan, korban dan kerugian), peran pemerintah (termasuk kebijakan penanggulangan bencana), peran masyarakat (sebagai korban, faktor penyebab atau penyelamat) dan yang terakhir berbicara tentang pengaruh dan tindakan stakeholders terkait dengan ancaman bahaya dan bencana tersebut.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kabupaten Malang memiliki banyak kawasan rawan bencana. Mulai dari longsor, banjir, tanah bergerak dan beragam bencana hidrometeorologi lainnya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Malang, sedikitnya ada 100 desa yang rawan bencana. Kabupaten Malang sendiri terdiri atas 390 desa dan kelurahan. Desa rawan bencana itu tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan di wilayah Malang Selatan yang rawan bencana antara lain Bantur, Donomulyo, Tirtoyudo, Ampelgading, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan. Di wilayah Malang barat, potensi bencana ada di Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon yang berbatasan dengan Kota Batu. Di wilayah Malang Timur terdapat Poncokusumo yang merupakan arah ke Gunung Bromo (www.jawapos.com)

Pada saat ini konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran makna bahwa bencana dapat diduga sebelumnya sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Rentang waktu dan fokus bantuan yang awalnya hanya berorientasi pemberian bantuan fisik, teknis semata dan hanya dilakukan pada saat tanggap darurat bencana, kemudian dengan konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat, kerja-kerja penanggulangan bencana dilakukan sejak sebelum bencana terjadi yaitu melalui upaya pencegahan, peredaman resiko dan peringatan dini. Bantuan juga lebih bersifat menyeluruh termasuk pendampingan trauma atau psikososial.

Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau *Community Based Disaster Preparedness (CBDP)* adalah program

pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Program ini bersifat partisipatif dan merupakan pendekatan lintas-sektoral melalui langkah-langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial-ekonomi, serta sebab-sebab yang tidak terduga lainnya. Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat berupaya menurunkan kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap dampak bencana melalui pemberian informasi serta tentang manajemen bencana, khususnya upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko serta tanggap darurat bencana. Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat menggunakan cara-cara yang relatif sederhana dan mudah dilaksanakan. Masyarakat di kalangan bawah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah tepat untuk mengurangi kerentanan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Proses pelaksanaan program tersebut yaitu dengan melakukan upaya-upaya penerahan semua potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong melindungi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga bila terjadi bencana mereka dapat menolong atau menyelamatkan diri sendiri, keluarga, serta warga masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul dalam penelitian ini yaitu: **Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat oleh**

BPBD Kabupaten Malang (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD Kabupaten Malang ?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD Malang.
2. Untuk menganalisis faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah baik secara langsung maupun tidak langsung bagi

instansi yang terkait, bagi universitas dan bagi mahasiswa. Adapun kegunaan penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

2. Kontribusi Praktis

Bagi BPBD Kabupaten Malang, menjadi bahan masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan alternatif dalam penetapan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mensistematika pembahasan serta memudahkan penguraian, skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dibagi lagi kepada beberapa sub bab sesuai dengan keperluan bahasan dan keperluan pembahasan dan tuntutan penguraian.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian,

tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang sudah digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti melakukan penyajian data analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini yaitu mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran yang sudah disampaikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Untuk mempermudah memahami makna kebijakan publik dari beberapa pendapat para ahli diantaranya: Bridgman dan Davis (2004), Hogwood dan Gunn (1990). Menurut Thomas R. Dye, kebijaksanaan publik tidak lebih dari pengertian mengenai “ Whatever government choose to do or not to do “.

Menurut Hogwood dan Gunn, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Adapun pendapat David Easton, dalam islamy (2007:17) memberikan arti kebijakan publik sebagai “*the authoritative of values for the whole society*”. Artinya, Easton hendak menegaskan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya otoritas yang sah untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai terhadap masyarakat.

Menurut Tangkilisan (2003: 2) mengartikan Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dapat diklasifikasikan sebagai proses management, dimana didalamnya terdapat fase serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai decision making ketika kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu

masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Dari beberapa defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian suatu tujuan untuk kepentingan masyarakat.

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (2000), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan agenda
- Formulasi kebijakan
- Adopsi/ legitimasi kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Evaluasi kebijakan.

Tahap 1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi

sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

Tahap 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai solusipermasalahan.

Tapa 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Tahap 4. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

Tahap 5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Proses kebijakan publik melibatkan banyak variabel untuk dikaji, maka beberapa ahli membagi tahapan tersebut untuk dikaji seperti proses di atas. Tujuannya untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisis tiap-tiap isu publik sehingga kemudian dapat diambil kebijakan agar kemudian dapat sampai pada tujuan dari kebijakan publik, yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196) menjelaskan bahwa:

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini, makaproses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknyapencapaian tujuan.

2. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan.

Sebagaimana mestinya keputusan tersebut dapat mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi, menyebutkan tujuan yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya (Widodo 2006:88).

Menurut Darwin dalam Widodo (2006: 89-90), setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu pemberdayaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik. Berikut penjabaran mengenai proses implementasi suatu kebijakan yang mencakup tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat anstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis oprasional. Kebijakan akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial dana kebijakan manajeriala akan dijabakan ke dalam kebijakan operasional. Kebijakan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah).

Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan sosialisasi kebijakan agar seluruh masyarakat dapat, mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuaa, dan sasaran.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan mana yang akan melaksanakan kebijakan, penetapan anggaran, penetan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses kebijakan kedalam realitas nyata. Tanpa aplikasi merupakan wujud dari

pelaksanaan setiap kegiatan dalam tahapan yang sudah disusun sejak awal.

C. Evaluasi Kebijakan

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik (*public policy study*), istilah evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) merupakan salah satu dari tahapan kebijakan (*public policy process*). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu (Widodo 2006:111).

Evaluasi memberikan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut Mustofadijaja dalam Widodo (2006:113), evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Lebih lanjut Mustofadijaja mengatakan :

“Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target groups*) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya”.

Tujuan pokok evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana

meminimalkan bahkan menghapus kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi semestinya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif dan membangun.

Ada beberapa fungsi evaluasi menurut Dunn (2000:27), antara lain :

- a) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercayamengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilaidan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadapnilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metodeanalisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Sedangkan Wibowo, dkk dalam riant (2008:477-488) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi. melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaanprogram dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-polahubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisidan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yangdilakukan oleh pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya,sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan olehkebijakan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-bearsampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru adakebocoran dan penyimpangan.

4) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Melalui paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan besar dalam kesatuan kebijakan publik. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian unsur-unsur dalam kebijakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya atau malah melenceng jauh dari tujuan sebenarnya.

2. Model Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu,

sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi (6) enam tipe sebagai berikut:

- 1) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil akibat yang diharapkan atau mencapaitujuan diadakannya tindakan.
- 2) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan rasionalitas ekonomi, yakni hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
- 3) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Kesamaan (*adequity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang

akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) secara adil didistribusikan.

5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6) Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi terdapat 2 jenis evaluasi, yakni evaluasi pada saat perumusan kebijakan, evaluasi saat pelaksanaan kebijakan (*process evaluation*) dan evaluasi pasca terjadinya kebijakan. Sedangkan berdasarkan aspek yang akan diteliti selama tahapan kebijakan, evaluasi dapat dibedakan menjadi evaluasi yang menitik beratkan pada substanti kebijakan, evaluasi yang menitik beratkan pada efisiensi penggunaan sumber daya dana, evaluasi pada pelaksanaan kebijakan, evaluasi pada dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dan evaluasi *comprehensive* yang memadukan seluruhan aspek sebelumnya.

Model evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berorientasi pada model evaluasi proses, dengan menggunakan metode *Project Monitoring Evaluation Research*. Melalui metode riset ini, peneliti bermaksud menguji apakah implementasi suatu kebijakan telah dilaksanakan

sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan kebijakan. sementara itu, untuk menilai pelaksanaan kebijakan penelitian ini akan menggunakan 6 kriteria evaluasi Dunn yakni efektivitas kebijakan, efisiensi kebijakan, kecukupan kebijakan, responsivitas kebijakan, ketepatan kebijakan, pemerataan kebijakan.

D. Definisi Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *streteus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006 :84). Penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Brecker dalam Heene dkk, 2010:53) Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon, 2011:13) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kemudian strategi menurut Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling

menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif.

Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Tingkat-tingkat Strategi

Merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

a. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara

organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya.

Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- 1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing,* dan *integrating*.
- 3) Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh

dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi.

3. Tipe-Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut

Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program strategy* (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program. Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu strategi mencakup bagaimana organisasi memulai tahapan pengenalan program-programnya kepada masyarakat dengan bentuk sosialisasi. Sehingga dengan begitu dampak dari terkenalnya organisasi ini yaitu masyarakat mengetahui dan mengenal lebih jauh untuk lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.

4. **Manajemen Strategi**

Manajemen strategi memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi.

Manajemen strategi adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai (Akdon, 2011:7). Sasaran manajemen strategi adalah meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi penganggaran, penggunaan sumber

daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan. Pada intinya manajemen strategi adalah memilih alternatif strategi yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan dalam segala hal guna mendukung jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi dan perusahaan harus melakukan manajemen strategi secara terus menerus dan fleksibel sesuai dengan tuntutan dan kondisi di lapangan.

Manajemen strategi memiliki beberapa pengertian diantaranya menurut Heene, dkk (2010:76) mengatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Kemudian menurut Poister dalam Heene dkk, 2010:76) manajemen strategi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan dari organisasi, kemudian mengaktualisasikan, memantau dan mengevaluasinya..

Akdon (2011:277) merumuskan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya masa datang.

Dengan demikian, manajemen strategi itu terdiri dari tiga macam proses manajemen yaitu pembuatan strategi, penerapan strategi, dan atau kontrol

terhadap strategi. Pembuatan strategi meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan pada organisasi, pengembangan alternatif strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, dan penentuan strategi yang sesuai untuk diaplikasikan. Penerapan strategi meliputi kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Sedangkan evaluasi strategi meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah koreksi bila diperlukan. Selanjutnya, dalam proses manajemen strategi ini, peneliti hanya berfokus pada penerapan strategi. Karena, strategi dalam penelitian ini mengarah pada komponen-komponen yang ada dalam proses pelaksanaan strategi.

Proses pelaksanaan strategi harus mengintegrasikan komponen-komponen yang mendukung jalannya pelaksanaan strategi tersebut.

Komponen-komponen tersebut meliputi: kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan (Akdon, 2011:277).

Komponen tersebut yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk strategi Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam mengawasi penyelenggaraan PPDB. Adapun penjelasan dari komponen tersebut, yaitu :

a) Kebijakan Organisasi

Strategi merupakan garis besar atau pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi tersebut maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan sendiri menurut Akdon (2011:154) adalah pedoman pelaksanaan tindakantindakan tertentu. Berdasarkan buku SAKIP LAN-RI dalam Akdon (2011:155) disebutkan bahwa elemen penting dalam menyikapi kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan, dan tidak hanya baik secara teoritis.

Kebijakan organisasi dapat berupa tindakan, cara/langkah, program-program dan kegiatan-kegiatan organisasi. Terkait dengan kebijakan organisasi dalam penelitian ini yakni berupa surat edaran. Surat edaran tersebut berisikan program-program yang harus dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan. Sistem Kinerja Akuntansi Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Akdon (2011:155), program didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dapat dikatakan sebagai terjemahan strategi ke dalam tugas operasional yang mencakup ruang lingkup cukup luas, waktu yang memadai, cukup komprehensif, dan memiliki rincian yang cukup detail (Salusu, 2006:435). Artinya program merupakan penjabaran secara rill

tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan strategi organisasi.

b) Memotivasi Pegawai

Menurut Hasibuan (2005:92) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Artinya motivasi mempersoalkan bagaimana caranya menggerakkan daya dan potensi seseorang supaya mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya memotivasi pegawai karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku pegawai supaya mau bekerja giat dan antusias dalam mencapai hasil yang maksimal. Menurut Hasibuan (2005:99), jenis motivasi dibedakan menjadi (a) motivasi positif (*reward*) merupakan motivasi dengan memberikan hadiah kepada pegawai yang berprestasi baik; (b) motivasi negatif (*punishment*) merupakan motivasi dengan memberikan hukuman kepada pegawai yang pekerjaannya kurang baik. Terkait dengan alat motivasi dalam bentuk *reward*, menurut Hasibuan (2005:99) dibagi menjadi tiga kategori yakni :

- 1) Material insentif merupakan alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, memberikan kebutuhan ekonomis;

2) Nonmaterial insentif merupakan alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda yang tak ternilai, hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani saja;

3) Kombinasi material dan nonmaterial insentif merupakan alat motivasi yang diberikan berupa material dan nonmaterial, memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani.

c) Alokasi Sumber Daya

Menurut Silalahi (2011:237), sumber daya merupakan aset, baik berupa orang dengan keterampilan dan pengetahuannya, modal finansial, fisik, serta hal-hal yang bersifat intanjibel termasuk faktor struktur dan kultural yang digunakan organisasi untuk memenuhi satu kebutuhan dan memecahkan masalah. Sumber daya dapat dikelompokkan atas sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resources*) atau sumber daya material (*material resources*).

Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce*) atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2011:238). Menurut Silalahi (2011:242), sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Silalahi (2011:261) sumber daya bukan manusia atau sumber daya material adalah berbagai fasilitas sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Walaupun manusia menjadi elemen penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi tetapi jika tidak didukung oleh sumber daya material yang memadai maka tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai secara optimal. Sumber daya material itu dapat berupa sumber daya finansial dan sumber daya fisik (sarana dan prasarana). Menurut

Silalahi (2011:262) sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Sedangkan, finansial merupakan modal yang diperlukan untuk membiayai aktivitas, baik untuk persediaan sumber daya material maupun membayar upah tenaga kerja. Pada dasarnya strategi yang telah disusun ke dalam berbagai alokasi sumber daya harus diimplementasikan.

Pelaksanaan strategi ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana dalam mencapai *outcome* organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan strategi merupakan langkah yang krusial dalam proses strategi. Oleh sebab itu, pelaksanaan suatu strategi adalah sesuatu yang sangat peka, menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunan alternatif dilakukan sudah harus dipertanyakan bagaimana melaksanakan alternatif itu.

Kunci suksesnya pelaksanaan strategi yakni apabila dapat menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dilakukan dengan memadukan persyaratan yang tepat sehingga pelaksanaan strategi dapat dinikmati (Salusu, 2006:436). Artinya bahwa keberhasilan implementasi suatu

strategi menuntut adanya upaya prakondisi terhadap segenap proses pelaksanaannya. Pelaksanaan strategi yang sukses membutuhkan dukungan, disiplin, motivasi dan kerja keras dari semua pihak. Sebab, menurut Salusu (2006:411) bahwa dalam suatu implementasi terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya dan faktor-faktor tersebut harus dikendalikan dengan baik.

5. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi pengendalian strategi. Pengendalian atas strategi dapat dikatakan merupakan suatu bentuk dari pengendalian arah dari suatu tujuan. Biasanya ada selisih waktu cukup besar antara implementasi awal suatu strategi dan pencapaian hasil yang diinginkan. Selama waktu itu, investasi dilakukan dan sejumlah proyek dan tindakan dilaksanakan untuk mengimplementasikan strategi. Juga, selama waktu itu terjadi perubahan-perubahan baik dalam situasi lingkungan maupun dalam situasi intern perusahaan/organisasi. Pengendalian strategi diperlukan untuk mengemudikan perusahaan/organisasi melalui peristiwa-peristiwa. Mereka harus menyediakan landasan untuk menyesuaikan tindakan dan arah perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya di tengah-tengah perkembangan dan perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pearce dan Robinson (2008:510) mendefinisikan bahwa pengendalian strategi adalah pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan

penyesuaian yang diperlukan. Bertolak belakang dengan pengendalian pasca tindakan, pengendalian strategi memedomani tindakan untuk kepentingan strategi ketika tindakan untuk kepentingan strategi ketika tindakan tersebut dilaksanakan dan ketika hasil akhir masih beberapa tahun lagi baru tercapai.

Pada saat melakukan evaluasi strategi, perlu direnungkan bersama bahwa pada dasarnya tidak terdapat satu pun tolak ukur absolut untuk menilai apakah sebuah strategi yang telah direalisasikan itu sudah baik atau mungkin belum baik. Setiap strategi tak lain adalah persepsi spesifik dari suatu tim manajemen mengenai bagaimana cara terbaik yang akan ditempuh untuk menghadapi kendala-kendala yang telah diantisipasi. Walaupun demikian ada beberapa ciri tertentu yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi. Menurut Rumelt dalam Heene dkk (2010:186), ciri-ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria menyeluruh, menyangkut :

- a. Konsistensi. Suatu strategi tidak diperkenankan sedikit pun untuk merumuskan berbagai perencanaan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsisten;
- b. Penyesuaian diri. Suatu strategi harus senantiasa memberikan respons adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi;
- c. Penciptaan nilai. Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai yang seoptimal mungkin

d. Potensi diri. Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani. Seperti juga proses pengawasan pada umumnya, proses evaluasi dan control strategi dimulai dari menentukan apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran, dan bila tidak sesuai dengan harapan, kita melakukan tindakan koreksi. Adapun tahapan atau proses dalam evaluasi strategi yaitu sebagai berikut :

1) Menentukan apa yang harus diukur

Di masa-masa awal pengembangan ilmu manajemen, perusahaan lebih sering memberi perhatian terhadap analisis keuangan saja. Hal ini cukup banyak kelemahannya karena itu semua berdasarkan analisis masa lalu. Dari proses dan implementasi strategi, mana yang dilakukan harus dievaluasi. Fokusnya harus pada elemen-elemen yang paling signifikan – sesuatu yang paling banyak perannya dalam pengeluaran atau masalah-masalah lain dari kinerja. Secara tradisional banyak perusahaan beranggapan bahwa mengevaluasi strategi hanyalah sekedar menilai bagaimana kinerja perusahaan. Apakah aset perusahaan meningkat? Apakah profitabilitas meningkat? Apakah tingkat produktivitas meningkat? Bagaimana dengan *Return On Investment*?

Dan banyak yang beranggapan jika indikator-indikator diatas cukup memuaskan berarti strategi kita berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, cara-cara semacam ini kadang-kadang membuat kita

misleading. Karena kita tau, strategi perusahaan berfokus bukan saja untuk jangka pendek, namun juga jangka panjang.

Analisis Rasio (Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Leverage Ratio, dan lain-lain), Return Employed, Earning Per Share, dan lain-lain tetap kita lakukan, tapi kita tambah dengan analisis lain seperti aspek pelanggan, aspek stakeholder, aspek SDM (melalui konsep Balanced Score Card, dan lain-lain). Standar biasanya mengukur apa hasil-hasil kinerja yang bisa diterima. Dalam penetapan standar ini, biasanya termasuk juga menetapkan rentang toleransi dimana deviasi dapat diterima. Standar hendaknya dibuat tidak hanya untuk hasil akhir, tapi juga hasil-hasil yang terjadi dalam proses. Dalam manajemen pengawasan, sekali lagi kita bersinggungan dengan istilah benchmarking di mana kita perlu merujuk pada kinerja yang unggul dari satu aspek oleh pemimpin industri.

2) Melakukan pengukuran atas kinerja actual

Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya setiap tiga bulan sekali misalnya dengan menggunakan atau mengadakan rapat. Dorongan akan dirasakan pada rapat-rapat evaluasi tersebut, di mana biasanya para manajer dalam situasi formal akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan aktivitasnya yang terbaik pula.

3) Membandingkan Kinerja Aktual dengan Standar yang Dibuat Jika kinerja actual berada diluar rentang toleransi, maka tindakan yang harus

diambil untuk mengoreksi deviasi tersebut. Hal-hal berikut harus menjadi pegangan, yaitu :

- 1) Apakah deviasi yang terjadi hanya sekedar fluktuasi saja?
- 2) Apakah proses yang sedang dijalankan memang tidak tepat?
- 3) Apakah proses yang dilakukan sesuai dengan pencapaian dari standar yang telah ditetapkan?

Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi penyimpangan, tapi yang paling penting lagi adalah agar kesalahan itu tidak pernah terulang kembali. Mengevaluasi strategi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri. Oleh sebab itu pengendalian strategi perlu dibagi menjadi beberapa jenis agar dapat membedakan berdasarkan jenisnya. Menurut Pearce dan Robinson (2011:479) terdapat empat jenis dasar pengendalian strategi :

- a. Pengendalian premis/asumsi. Setiap strategi didasarkan pada landasan-landasan pemikiran perencanaan tertentu. Pengendalian asumsi dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan berkesinambungan apakah asumsi yang mendasari strategi itu masih berlaku. Jika asumsi yang vital tidak lagi berlaku maka strategi mungkin harus diubah. Makin cepat asumsi yang tidak berlaku lagi dapat diketahui dan ditolak, makin besar kesempatan menyiapkan perubahan strategi.
- b. Pengendalian atas implementasi. Implementasi strategi berlangsung dalam bentuk serangkaian langkah, program, investasi, dan tindakan-tindakan yang terjadi sepanjang waktu tertentu. Program-program khusus

dilaksanakan. Bidang-bidang fungsional memulai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan strategi pejabat-pejabat kunci ditambahkan atau dimutasi. Sumber daya dimobilisasi. Dengan kata lain, para manajer mengimplementasikan strategi dengan dengan mengubah rencana-rencana umum menjadi tindakan-tindakan dan hasil yang konkrit dan bertahap dari setiap unit dan perseorangan. Pengendalian implementasi adalah bentuk pengendalian strategi yang harus dilakukan ketika suatu peristiwa berlangsung. Pengendalian implementasi dirancang untuk menilai apakah strategi keseluruhan perlu diubah dengan melihat hasil-hasil dan berbagai tindakan yang mengimplementasikan strategi total.

c. Pengamatan strategi. Berdasarkan sifatnya, pengendalian asumsi dan pengendalian implementasi adalah pengendalian yang terfokus, sedangkan pengawasan strategi ini bersifat tidak terfokus. Pengawasan strategi dirancang untuk memantau beragam peristiwa di dalam dan di luar perusahaan/organisasi yang mungkin sekali mempengaruhi jalannya strategi.

d. Pengendalian peringatan khusus. Pengendalian peringatan khusus adalah pemikiran kembali terhadap strategi perusahaan secara mendalam dan seringkali cepat akibat adanya kejadian tak terduga yang mendadak.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang evaluasi strategi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi strategi merupakan suatu pengendalian strategi pada tahapan implementasinya strateginya dengan melihat masalah

atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya kemudian melakukan tindakan atau keputusan yang tepat.

E. Manajemen Bencana

1. Definisi Manajemen Bencana

Bencana merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan lingkungan dan diluar kemampuan manusia untuk dapat mengendalikannya, disebabkan oleh faktor alam atau manusia atau sekaligus oleh keduanya. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006). Sedangkan menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Berdasarkan defnisi bencana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bencana menurut Undang-Undang No24 Tahun 2007, antara lain:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.

Penanganan bencana mencakup aspek mitigasi bencana (pencegahan), *emergency* saat terjadinya bencana, dan aspek rehabilitasi.

Penanganan *emergency* targetnya adalah penyelamatan sehingga risiko tereliminir. Sedangkan rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan pada kondisi normal kembali. Oleh karena itu dalam melakukan upaya penanggulangan bencana perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:

Mengintegrasikan mitigasi bencana dalam program pembangunan yang lebih besar; Pemilihan upaya mitigasi harus didasarkan atas biaya dan manfaat; Agar diterima masyarakat, mitigasi harus menunjukkan hasil yang segera tampak; Upaya mitigasi harus dimulai dari yang mudah dilaksanakan segera setelah bencana terjadi; Mitigasi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan lokal dalam manajemen dan perencanaan.

Dalam melakukan mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa dalam melakukan mitigasi bencana perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Cepat dan Tepat, Yang dimaksud dengan prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa.

- 2) Prioritas, Yang dimaksud dengan prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

- 3) Koordinasi dan Keterpaduan, Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

- 4) Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Yang dimaksud dengan prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,

terutama khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5) **Transparansi dan Akuntabilitas.** Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

6) **Kemitraan,** Penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemitraan dalam penanggulangan bencana dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Bahkan, kemitraan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri termasuk dengan pemerintahannya.

7) **Pemberdayaan,** Pemberdayaan berarti upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Negara memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat agar mengurangi dampak dari bencana.

8) **Non Diskriminatif,** Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminatif adalah bahwa negara dalam penanggulangan

bencana tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

- 9) Non Proletisi, Yang dimaksud dengan prinsip proletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

2. Penyelenggaraan Manajemen Bencana

Dalam melakukan upaya penanggulangan bencana dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus memperhatikan prinsip-prinsip di atas. Selain itu, BPBD sebagai unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat terhadap bencana alam, non alam dan sosial perlu melakukan upaya penanggulangan bencana meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan (mitigasi), penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana maupun setelah bencana dan menghindarkan dari bencana yang terjadi. Upaya penanggulangan dampak bencana oleh BPBD harus dilakukan melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah bencana. Upaya penanggulangan dampak bencana tersebut dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok korban. Upaya

penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu :

- 1) Tahap Tanggap Darurat. Tahap ini merupakan tahap yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah melalui BNPB, BPBD serta LSM dan masyarakat baik lokal maupun internasional juga beberapa

instansi terkait di pusat. Tahap ini bertujuan membantu masyarakat

yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan

dasarnya yang paling minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap

darurat ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan.

Dalam tahap tanggap darurat ini, diupayakan pula penyelesaian

tempat penampungan sementara yang layak, serta pengaturan dan

pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh

korban bencana.

- 2) Tahap Tanggap Darurat. Pada tahap tanggap darurat, hal yang paling pokok yang sebaiknya dilakukan adalah penyelamatan korban bencana. Inilah sasaran utama dari tahapan tanggap darurat.

Selain itu, tanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang

terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan

dasarnya yang paling minimal. Para korban juga perlu dibawa ke

tempat sementara yang dianggap aman dan ditampung di tempat

penampungan sementara yang layak. Pada tahap ini dilakukan pula

pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat

dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana.

3) Tahap Rehabilitasi. Tahap ini bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai.

Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

4) Tahap Rekonstruksi. Tahap ini bertujuan membangun kembali daerah bencana dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian tata ruang (apabila diperlukan) di tingkat kabupaten terutama di wilayah rawan gempa (daerah patahan aktif). Sasaran utama dari tahap ini adalah kembali masyarakat dan kawasan wilayah bencana. Selain upaya yang bersifat preventif, perlu juga ada upaya-upaya yang sifatnya represif. Tentunya upaya-upaya tersebut harus dikoordinasikan secara baik dengan pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan masalah dalam suatu kondisi, tata cara dalam situasi tertentu, hubungan antar kegiatan, sikap serta proses yang sedang berlangsung. Menurut Kountor (2004:105), “penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.” Sedangkan Nazir (2003:54) berpendapat bahwa “penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” Digunakannya jenis penelitian ini adalah bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Kemudian di dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Kountur (2004:16) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar.” Dipilihnya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini sebab penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan analisis strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ialah untuk membatasi studi dan membatasi bidang *inquiry*. Tanpa adanya proses penelitian maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperolehnya di lapangan. Karena itu, fokus penelitian memiliki peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling terkait, karena permasalahan penelitian dijadikan acuan penentuan fokus penelitian meskipun dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD

Kabupaten Malang di desa Pandansari Kecamatan Ngantang:

- a. Strategi organisasi
- b. Strategi program
- c. Strategi pendukung sumberdaya manusia
- d. Strategi kelembagaan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh BPBD Kabupaten

Malang di desa Pandansari Kecamatan Ngantang.

- a. Faktor pendukung

b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Menurut Moleong (2005:76), “cara terbaik dalam penentuan lokasi adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.” Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga juga perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini diadakan di Kabupaten Malang, sedangkan situs dalam penelitian ini adalah di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan penelitian dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang dan masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data yang tersedia. Pada penelitian ini data sekunder berupa berita dari situs internet, dan literatur-literatur lainnya yang diperoleh dari

kepuustakaan mengenai pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Menurut Arikunto (1998:116), “yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Subjek disini adalah seseorang atau sesuatu hal atau benda yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi.” Lofland dalam Moleong (2001:157) menjelaskan bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.” Berdasarkan masalah dan fokus penelitian, sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang disingkat dengan 3P, yaitu:

1. *Person* (orang) adalah tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti. Dalam hal ini, *person* yang sudah dijadikan objek penelitian adalah informan dari Dinas Sosial Kabupaten Malang dan masyarakat di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang.
2. *Paper* (kertas) adalah berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan (SK) dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
3. *Place* (tempat) yakni sumber data keadaan di tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2006:134) mengemukakan bahwa “teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.”

Cara menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya diperhatikan penggunaannya. Dalam rangka memperoleh data lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *Field Research* (studi lapangan) yaitu merupakan teknik pengumpulan data melalui terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan melakukan:

1. Observasi

Observasi merupakan cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan sumber informasi. Sumber informasinya berupa orang (narasumber) yang merupakan sumber data yang berjenis data primer, pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh data yang bersifat sekunder, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini, peneliti tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan untuk itu, atau merekam sebagaimana adanya. Peneliti memfokuskan pengumpulan data ini melalui data dan arsip dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Data yang dikumpulkan juga berasal dari buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, jurnal-jurnal perguruan tinggi, penelitian-penelitian terdahulu serta artikel yang termuat di media cetak maupun media elektronik.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dimana dalam pengumpulan datanya lebih banyak tergantung pada diri peneliti itu sendiri. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit karena sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Instrumen penunjang yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai panduan wawancara dengan para objek penelitian yang telah diuraikan di atas.
2. Perangkat penunjang yang meliputi catatan lapangan (*field note*) dan alat tulis menulis.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Menurut Sugiyono (2009:14) yaitu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snobaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pengujian keabsahan data meliputi:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam suatu penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.”

3. Uji Reabilitas (*Reability*)

Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa, “jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.”

4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. *Uji confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi *standar confirmability*.

H. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat.

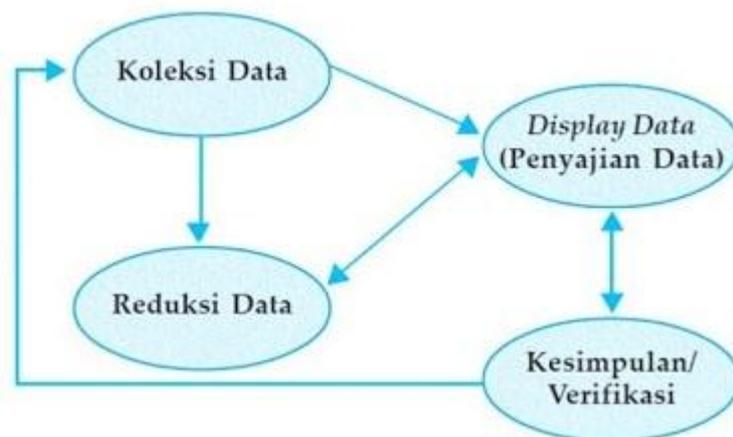
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.

Menurut Nawawi dan Hadari (1983:25) “dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung dan data atau informasi yang diperoleh harus dianalisa, berupa usaha menafsirkan untuk mengetahui maknanya serta dihubungkan dengan

masalah penelitian.” Analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian dengan jawaban yang tepat.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014:20), di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny Saldaña, (2014).

Analisis dalam data kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini observasi lapangan dan dokumen.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyerderhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data.

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90" sampai 112°57'00" Bujur Timur, 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto
- Sebelah Timur : Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
- Sebelah Barat : Kab. Blitar dan Kab. Kediri
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Peta Geografis Kabupaten Malang



Gambar 2. Wilayah Administratif Kabupaten Malang

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² (sumber; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38

kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

2. Kondisi Administratif

Tabel 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malang

Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Persentase
Donomulyo	192,60	6,47
Kalipare	105,39	3,54
Pagak	90,08	3,03
Bantur	159,15	5,35
Gedangan	130,55	4,39
Sumbermanjing	239,49	8,04
Dampit	135,31	4,55
Tirtoyudo	141,96	4,77
Ampelgading	79,60	2,67
Poncokusumo	102,99	3,46
Wajak	94,56	3,18
Turen	63,90	2,15
Bululawang	49,36	1,66
Gondanglegi	79,74	2,68

Pagelaran	45,83	1,54
Kepanjen	46,25	1,55
Sumberpucung	35,90	1,21
Kromengan	38,63	1,30
Ngajum	60,12	2,02
Wonosari	48,53	1,63
Wagir	75,43	2,53
Pakisaji	38,41	1,29
Tajinan	40,11	1,35
Tumpang	72,09	2,42
Pakis	53,62	1,80
Jabung	135,89	4,56
Lawang	68,23	2,29
Singosari	118,51	3,98
Karangploso	58,74	1,97
Dau	41,96	1,41
Pujon	130,75	4,39
Ngantang	147,70	4,96
Kasembon	55,67	1,87
Jumlah	2 977,05	100,00

Sumber : BPS Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Malang

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kepala desa/lurah di

Kabupaten Malang. Kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 24,10 persen, SMU sekitar 52,56 persen, Akademi 1,80 persen, dan Universitas 21,54 persen.

Mengacu pada hasil rekap sensus penduduk pada tahun 2014-2017, pada tahun 2018 Penduduk Kecamatan Ngantang berjumlah 56.418 jiwa yang terdiri dari 28.474 penduduk Laki-laki, dan 27.944 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Ngantang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014-2017

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
2014	28.395	27.886	56.280
2015	28.433	27.913	56.346
2016	28.456	27.932	56.388
2017	28.474	27.944	56.418

Sedangkan untuk hasil rekap Penduduk Desa Pandansari sendiri pada tahun 2014 berjumlah 4.930 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.427 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.503 jiwa.

Tabel 3

Jumlah penduduk desa pandasari menurut jenis kelamin tahun 2014

Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
2014	2427	2503	4930

Sumber : SID Desa Pandansari, bidang informasi

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang (BPBD Kabupaten Malang)

Gambar 3

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sumber: hasil foto peneliti

a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiriberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Unsur Pengarah
- 3) Unsur Pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabatoleh Sekretaris Daerah.Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Badan.Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksanayang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulanganbencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggapdarurat dan pasca bencana.Unsur melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyaifungsi :

- a) Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah
- b) Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- c) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Malang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiriberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut uraian tentang tugas pokok BPBD Kabupaten Malang :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksisecara adil dan setara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- 2) Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
- 3) Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi. Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi pelaksana

sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 komposisinya sebagai berikut:

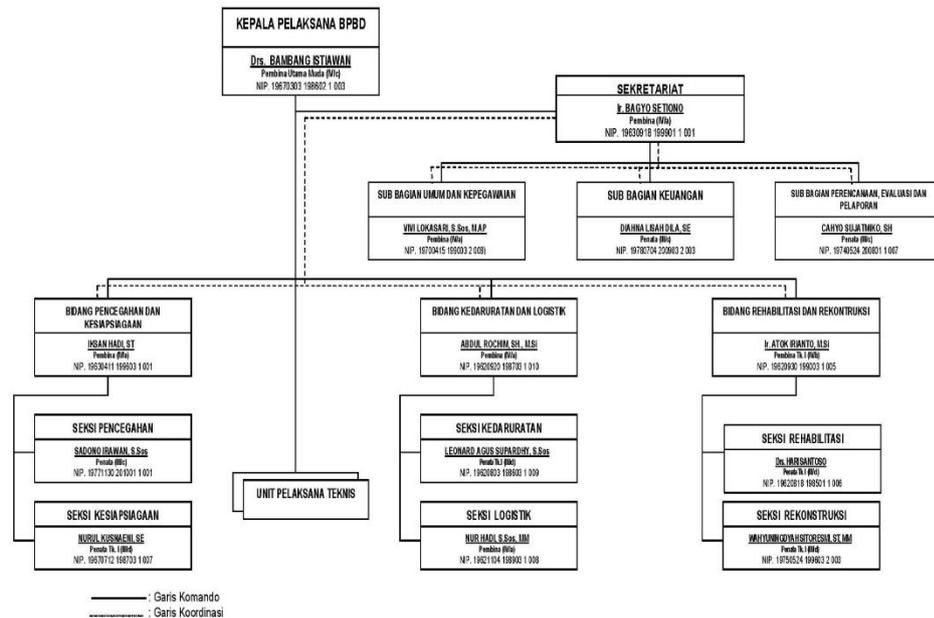
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretaris pelaksana, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 - a) Seksi Rehabilitasi

b) Seksi Rekonstruksi

Gambar 4

Struktur organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sumber: Kantor BPBD Kabupaten Malang

3. Gambaran Desa Pandansari Kecamatan Ngantang

Desa Pandansari yang memiliki LUAS 1.103,425 Ha terbagi menjadi 7 Dusun yaitu Dusun Plumbang, Dusun Bales, Dusun Munjung, Dusun Sambirejo, Dusun Wonorejo, Dusun Klangon, dan Dusun Sedawun.

Desa Pandansari memiliki keterbatasan dalam sarana angkutan umum dan sarana pelengkap jalan, selain itu jalan penghubung antar dusun

masih ada yang kondisinya rusak sehingga menyebabkan tingkat aksesibilitas di Desa Pandansari kurang memadai, jarak tempuh dari pusat desa ke hierarki yang lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 12,2 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 71,4 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 131,3

Desa Pandansari merupakan desa yang terletak pada ketinggian 600-1350 meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan 15-55 % , Topografis Desa Pandansari berupa dataran seluas 23,536 Ha, perbukitan seluas 247,074 Ha, waduk seluas 90 Ha, sawah seluas 94,458 dan sungai.

Gambar 5



Sumber: <http://desa-pandansari.malangkab.go.id>

Desa Pandansari yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngantang yang terletak dibagian barat Kabupaten Malang tepatnya 49 Km

dari kota Malang dan 12 Km dari kecamatan Ngantang dengan ketinggian ± 650 meter dari permukaan air laut serta memiliki suhu rata-rata 24°C dengan curah hujan rata-rata 1.565 mm pertahun.

Berikut ini visi dan misi Desa Pandansari untuk mengembangkan potensi Desa :

Visi Desa Pandansari, antara lain :

Terwujudnya Desa Pandansari Yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib, Berdaya Saing dan Sejahtera. “MADEP MANTEBS” Melalui Peningkatan SDM Serta Hati Mulia Mbangun Deso”

Mempunyai slogan “Nyawiji Mbangun Deso”

Misi Desa Pandansari, antara lain :

- A. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
- B. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.
- C. mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
- D. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Desa Pandansari, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada

menguatkan kesalehan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial.

Desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencapaian buruh tani, peternak, dan pencari pasir dan batu ini bervariasi karakter dan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Dibandingkan dusun yang lain, dusun Plumbang merupakan dusun yang paling maju dari segi pendidikan dan sejahtera ekonomi, dan Bales masih perlu diperhatikan lagi kesejahteraan ekonominya. Setelah gunung Kelud meletus (13/2/2014 lalu, banyak warga yang beralih pekerjaan didominasi mencari pasir dan batu, karena kontur tanah belum stabil terkena abu vulkanik pasca bencana. Sehingga, banyak ditemui remaja laki-laki di sungai Sambong, sedangkan remaja perempuan (misalnya di Sambirejo) paling banyak bekerja pemerah susu. Desa Pandansari memiliki total jumlah penduduk 3120 jiwa, yang mana sebagian dari remaja putra maupun putri setelah lulus sekolah (tamat SD/SMP/SMA) lebih tertarik dan menjadi keistimewaan sendiri bekerja di luar kota. Berikut tabel merinci jumlah penduduk di masing-masing dusun, yakni:

Tabel 3
Jumlah penduduk

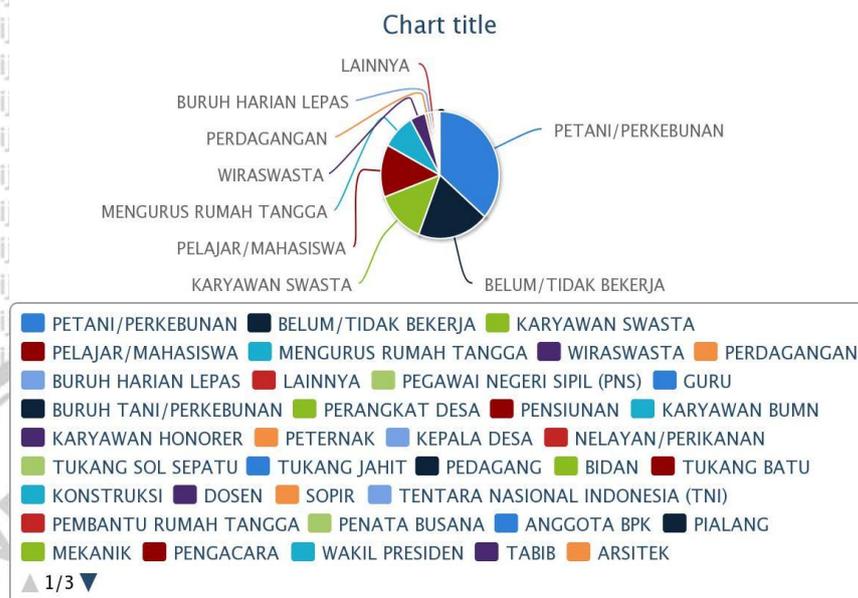
NO	WILAYAH	Jmh RT	Jml RW	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Penduduk	Terdiri		Jumlah KK
						L	P	
1	Plumbang	7	1	245 HA	1.352	682	670	394
2	Bales	2	1	40 HA	476	236	248	133
3	Munjung	2	1	90 HA	607	327	302	305
4	Sambirejo	4	1	212,585 HA	1.127	584	543	317
5	Wonorejo	3	1	315 HA	654	337	317	185
6	Klangon	2	1	25,16 HA	476	248	228	142
7	Sedawun	4	1	176 HA	932	337	317	258
Jumlah		24	7	1.103,425 HA	5.624	2.842	2.782	1.598

Sumber : <http://desa-pandansari.malangkab.go.id>

Guna meningkatkan kegiatan perekonomian, Desa berupaya memaksimalkan potensi yang ada seperti pemeliharaan sapi perah, mengingat banyaknya lahan sekitar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam rumput gajah /kolonjono yang sangat baik untuk makanan ternak sapi perah, sehingga hasil produksi susunya bias meningkat terus.

Selain ini juga Pemerintah Desa selalu mendorong dan memotifasi masyarakat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menopang kebutuhan ekonomi rumah tangganya

Gambar 6
Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan



Sumber : <http://desa-pandansari.malangkab.go.id>

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

1. KEPALA DESA

- Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan peraturan Desa
- Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

- Membina kehidupan masyarakat Desa
- Membina ekonomi desa
- Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIS DESA

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Fungsi :

- Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. KEPALA URUSAN (KAUR) UMUM

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4. KAUR KEUANGAN

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

5. KAUR PEMERINTAHAN

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

- Administrasi Pemerintahan Desa :
- Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penanggulangan-penanggulangan. Misalkan penanggulangan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit.

Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya

SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu

- Surat Keterangan Lalu Lintas
- Surat Keterangan NTCR
- Surat Pengantar Pernikahan
- Surat Keterangan Naik Haji
- Surat Keterangan Domisili
- Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Lahir/Mati
- Surat Keterangan Ke Bank dll.
- Surat Keterangan Pengiriman Wesel

- Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- Surat Keterangan Izin Keramaian
- Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
- Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
- Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

6. KAUR EKONOMI PEMBANGUNAN

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi :

- Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

7. KAUR KESRA (KESEJAHTERAAN RAKYAT)

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi :

- Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

8. KEPALA DUSUN (KADUS)

Tugas :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya

- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat

- Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun

- Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat

- Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa..

B. Penyajian Data Fokus

Sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan maka sajian data penelitian dapat diuarikan sebagai berikut:

1. Strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh Pemerintah

Kabupaten Malang

a. Strategi Organisasi

Pelaksanaan strategi organisasi merupakan upaya dalam pekasnaan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Pelaksanaan strategi organisasi dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang (BPBD Kabupaten Malang) menurut Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yaitu :

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten Malang telah menetapkan panduan dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sama serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Panduan atau arahan tersebut sebagai upaya dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana.

Selanjutnya beliau juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Strategi organisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana serta terus memberikan dorongan dalam upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana. Adanya sistem peringatan terjadinya bencana juga menjadi petunjuk dalam upaya pelaksanaan evakuasi dapat dilakukan.

Gambar 7

Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat



Sumber :desa pandansari

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang (BPBD Kabupaten Malang) memiliki dukungan dalam proses pengendalian bencana sehingga terwujudnya program penanggulangan bencana berbasis masyarakat lebih baik dari pada sebelum terjadi bencana,

melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, meningkatkan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya bapak Suwondo juga memberikan pernyataan bahwa:

Program yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya pada bidang penanggulangan bencana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan terhadap masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan strategi program tersebut diharapkan program dapat berjalan sehingga memberikan dukungan dalam proses atau aktivitas penganggulangan bencana yang dilakukan. Strategi dalam pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara maksimal dengan adanya dukungan atau partisipasi aktif masyarakat tingkatan sangat penting bagi keberhasilan program. Partisipasi dalam strategi pelaksanaan program tersebut juga termasuk pada saar perencanaan (mendesain),

pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi. Keterbukaan dan transparansi di segala aspek manajemen harus diterapkan guna menciptakan iklim kesetaraan dan citra positif pada semua pihak yang terkait.

Keikutsertaan warga masyarakat sama pentingnya. Adalah perlu untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di tingkat paling bawah agar dapat mendukung setiap inisiatif kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Perencanaan *bottom-up* merupakan sarana untuk melibatkan warga masyarakat agar berpartisipasi secara langsung. Partisipasi warga masyarakat dalam mengidentifikasi risiko dan tingkat prioritas diperlukan untuk mendesain kegiatan yang relevan dalam pelaksanaan strategi organisasi dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

b. Strategi Program

Pelaksanaan strategi organisasi pada dasarnya merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dalam melaksanakan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat yaitu dengan melakukan pemilihan lokasi rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada seluruh upaya terdampak akibat bencana yang dianggap potensial dapat menangani masalah keberlangsungan

hidup masyarakat desa pandansari. Dalam pelaksanaannya pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan dana yang ada. Pemerintah melakukan kualifikasi pembangunan yang memenuhi kriteria kebutuhan masyarakat diantaranya Infrastruktur, Pemukiman, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pembangunan disektor infrastruktur yang meliputi Jembatan, akses jalan, drainase, dan penerangan jalan. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yaitu :

“Pelaksanaan strategi program yang telah dilakukan dalam hal ini mengenai penentuan lokasi dan fokus pembangunan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana, tidak bisa secara menyeluruh semua sektor terpenuhi. Paling utama pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sini ya dibidang infrastuktur (dalam hal ini jembatan dan akses jalan desa). Kenapa demikian? Karena kalau jembatan dan akses jalan desa sudah terbangun dampak yang dirasakan masyarakat sangat terasa. Jembatan dan akses jalan merupakan jantung keberlanjutan kehidupan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Kalau masalah infrastruktur tersebut sudah teratasi otomatis ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan”

Pelaksanaan strategi organisasi selanjutnya yaitu dengan melakukan pembangunan sektor infrastruktur, pemanfaatan fisik infrastruktur baik jembatan maupun akses jalan merupakan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandansari. Sebagaimana berdasarkan pantauan dilapangan, dengan terbangunnya infrastruktur baik akses jalan maupun jembatan, sebagaian besar warga Desa Pandansari yang

tadinya sebagai petani dan peternak banyak yang beralih menjadi penambang pasir. Peranan infrastruktur adalah sebagai aspek penting dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Peranan infrastruktur dapat dikatakan sebagai mediator antara lingkungan sebagai suatu elemen dasar dengan sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, peranan infrastruktur juga merupakan elemen pendukung kegiatan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana. Prasarana perlu disediakan karena prasarana merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan prasarana dapat menggerakkan potensi setelah terjadinya bencana. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Hal ini dilakukan warga untuk menambah penghasilannya disamping sebagai petani dan peternakan. Hal tersebut disampaikan bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang mengatakan :

“Kondisi yang ada disini menunjukkan bahwa warga merasakan adanya keberadaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana program terkait pelaksanaan aktivitas pengelolaan berjalan sesuai dengan harapan.

Upaya lainnya yaitu mengenai rehabilitasi sektor ekonomi. Namun dibalik manfaat tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih di keluhkan warga. Yaitu permasalahan di sektor ekonomi masyarakat yang terdampak bencana, yakni kurangnya bantuan berupa bibit tanaman dan ternak. Yang mana setelah bencana warga mengalami permasalahan terkait dengan kondisi ekonomi. Dan kurang memiliki pemahaman terkait dengan upaya pencegahan bencana yang terjadi. Hal ini juga disampaikan oleh kepala desa yaitu :

“Proses pelaksanaan rehabilitas bencana sebenarnya belum sepenuhnya memiliki dampak kondisi sosial masyarakat dimana dalam pelaksanaan potensi tersebut belum sepenuhnya memiliki dukungan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk pengurangan risiko bencana Desa Pandansari memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan terhadap bencana.

c. Strategi Pendukung Sumberdaya Manusia

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan

untuk memberikan dukungan atau jaminan bahwa aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Kinerja Organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi yang dicapai secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan yang menyangkut usaha yang sistematis dan untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus guna mencapai kebutuhan yang efektif. Upaya yang dilakukan terkait dengan bentuk dukungan yang ditetapkan oleh organisasi terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan suatu tahapan akhir kegiatan yang dilakukan dengan menganalisis efisiensi dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi suatu kegiatan, serta dilakukan pula penentuan tingkat efektivitas yang dapat menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan, hasil, manfaat dan dampaknya. Evaluasi kinerja juga dilaksanakan berdasarkan hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja adalah hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja tertentu dalam suatu organisasi, sehingga antara penilaian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui suatu kinerja organisasi berjalan baik atau buruk.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau

penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat wilayah Kabupaten Malang

Bentuk dukungan sumber daya manusia dalam proses peyusunan strategi dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang khususnya mengenai strategi pendukung yang ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana telah didukung oleh keberadaan sumber daya yang memiliki potensi dalam upaya pengembangan kemampuan pengelolaan secara tepat. Masyarakat sebagian besar merasakan dampak yang memuaskan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang menurut saya itu masih dalam hal sewajarnya. Warga juga memahami akan keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk merealisasikan usulan dari warga, baik dari segi infrastruktur, ekonomi dan sosial dan didukung oleh sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Bapak thoyib selaku selaku warga Desa Pandansari beliau mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana Desa Pandansari Kecamatan Ngantang dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam proses pelaksanaan atau upaya untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik dalam upaya penanggulangan pra dan pasca bencana maka dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kualitas sehingga program dapat dijalankan sesuai.

Pernyataan berbeda disampaikan Bapak Eko warga Desa Pandansari memberikan tanggapan bahwa:

Sangat tepat, terlebih dalam hal infrastruktur (jembatan), jalan disini itu sudah berkali-kali diaspal. Pokok rusak sedikit jalannya lalu warga membuat usulan ke pemerintah desa dan dengan cepat ditanggapi dan saya sangat terbantu dengan keterdiaan jalur evakuasi kalo menurut saya juga memberikan jaminan kemudahan dalam pengnggulan bencana

Gambar 8

Jalur Evakuasi



Sumber : desa Pandansari

Upaya untuk pengendalian terkait dengan tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya manusia yang ada. Menurut bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari terkait strategi pendukung sumber daya manusia pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang dapat diketahui dari hasil wawancara berikut:

Masih ada beberapa hal yang menurut saya belum maksimal, karena factor usia dan pekerjaan.

Bapak Thoyib selaku warga Desa Pandansari memberikan penjelasan mengenai keberadaan sumber daya pendukung yaitu sebagai berikut:

Dalam upaya untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan maka dukungan terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga penggunaan sumber daya manusia dalam mendukung program dapat dimaksimalkan.

Selanjutnya dibutuhkan penanggulangan bencana baik itu pra bencana atau (mitigasi bencana), bencana, maupun pasca bencana. Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari juga memberikan tanggapan terkait dengan indikator kecukupan dalam pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, yaitu sebagai berikut:

Permasalahan/kendala pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu belum maksimalnya pembangunan yang dilakukan sebagai upaya dalam penganggukan bencana, melakukan penggalangan dana swadaya untuk merealisasikan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skala yang

ringan-ringan. Untuk skala yang besar seperti jembatan, pemukiman itu pendanaannya berasal dari anggaran pusat

Bapak eko warga Desa Pandansari menyatakan bahwa indikator kecukupan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana Pandansari

Kecamatan Ngantang dapat diketahui dari hasil wawancara berikut:

Bagiku mas, pelaksanaan penanggulangan bencana ini masih kurang mas. Karna pada kenyataannya masih ada hal-hal yang belum terealisasi dengan rencana.

Dalam Konsep manajemen bencana, kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multidisiplin. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan pun melingkup peraturan perundang-undangan lintas sektor. Dengan kalimat lain, sesungguhnya kegiatan manajemen bencana dilaksanakan oleh sektor-sektor, sedangkan kegiatan dari lembaga kebencanaan sebagian besar adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh sektor. Berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harus saling bekerjasama dan menyamakan persepsi tentang bencana dan manajemen bencana melalui sebuah sistem atau aturan main yang disepakati tau sistem manajemen bencana. Melalui manajemen bencana pula program atau kegiatan dilaksanakan pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja oleh para pemangku kepentingan secara komprehensif dan terus-menerus.

Kejadian bencana akan menjadi sia-sia karena bencana akan terus terjadi secara berulang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, manajemen bencana sebagai seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan oleh semua elemen, pemerintah, masyarakat sipil, dan kalangan bisnis-korporasi untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Bapak Supri warga Desa Pandansari menyatakan bahwa pemerataan pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana Desa Pandansari Kecamatan Ngantang dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

Pemerataan dalam ekonomi belum bisa dirasakan bagi saya atau masyarakat sini. Sebegini kecil dapat dirasakan oleh masyarakat tertentu. Kalau kondisi dikampung/desa itu kadang bantuan hanya tersalurkan ke orang-orang tertentu saja dan dalam hal bantuan bibit tanaman masih sangat kurang. Jadi untuk pemerataan pelaksanaannya bagiku masih belum merata.

Dalam memahami pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang maka diperlukan memahami terlebih dahulu tentang bencana dan hal ini berkaitan secara langsung dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor manusia sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda

dan dampak psikologi. Sementara itu, penanggulangan bencana berkaitan erat dengan serangkaian upaya untuk menghindari dan/atau mengurangi akibat yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana.

Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari menyatakan bahwa dalam responsivitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, yaitu sebagai berikut:

Pemerintah desa sini sangat responsiv dan pas mas. Saya ambil contoh perbaikan jembatan penghubung antar desa, dalam hal ini jembatan merupakan jantung perekonomian masyarakat. Pemerintah sangat tanggap membaca kebutuhan pokok dari warga.

Bapak Slamet warga Desa Pandansari memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut:

Pemerintah sangat respon dan masyarakat sangat menyadari akan adanya bencana. Jadi kalau pihak pemerintah sudah mengatakan evakuasi ya masyarakat wes paham dan manut kalau dievakuasi. Mengenai respon mengenai kebutuhan masyarakat menurut saya sudah baik dan pemerintah merespon dengan baik.

Peranan pemerintah diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian peranan dalam pemerintah Kecamatan adalah tugas dan wewenang pemerintah Kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu supaya pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya.

d. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan upaya pengelolaan pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang. Strategi kelembagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang (BPBD) dapat ditunjukkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang yaitu sebagai berikut:

Kami dari BPBD juga membentuk desa tangguh bencana. Menurutnya, desa tangguh bencana dipersiapkan agar masyarakat yang daerahnya rawan bencana bisa lebih siap jika terjadi bencana. Pembentukan desa tangguh bencana di antaranya adalah upaya meminimalisir timbulnya korban dalam terjadinya sebuah bencana. Tentunya dengan karakter daerah masing-masing. Jika daerah pesisir, desa tangguh bencana dibentuk agar siap menghadapi bencana banjir Untuk di daerah pegunungan, juga dibentuk siap menghadapi bencana gunung meletus misalnya,” jelas Bambang. Untuk itu nantinya seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang akan dibentuk menjadi desa tangguh bencana Sesuai dengan RPJMD sampai tahun 2021, setiap tahun akan ada tiga desa yang akan dijadikan sebagai desa tangguh bencana Kami juga berharap desa tangguh bencana juga bisa dibentuk secara mandiri.

Apabila ditinjau dari tingkat ketepatan dalam menjalankan strategi kelembagaan yaitu merupakan upaya untuk memberikan dukungan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, kondisi ini terjadi karena adanya beberapa hal yang menyebabkan proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, salah satunya mengenai ketepatan dalam kebijakan.

Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang menyatakan bahwa ketepatan dalam pelaksanaan

penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang yaitu sebagai berikut:

Menurut strategi yang ditetapkan oleh BPBD benar-benar sesuai usulan, menurut saya tepat dan sangat baik menurut saya. Sebagai contoh, pada saat ini musim banjir, curah hujan tinggi maka dengan terbangunnya jebatan maka masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjalani aktivitas dan merasa aman dari bencana, baik menuju desa lain atau melakukan proses jual beli kebutuhan pokok masyarakat sehingga strategi yang ditetapkan dapat mendukung upaya penyelesaian permasalahan.

Hasil strategi kelembagaan mengenai penanggulangan bencana yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam menetapkan segala bentuk kebijakan terkait dengan dukungan kepada masyarakat setelah proses bencana terjadi. Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-bencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan. Selain itu adanya dukungan terkait dengan aktivitas operasional dalam proses penanggulan bencana juga didukung dengan adanya sejumlah anggaran dalam proses operasionalnya.

Anggaran/Dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2012-2015)

sebesar Rp. 31.559.839.425,- (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana di bawah ini :

Tahun 2012

Belanja Tidak Langsung Rp 998.712.103,-

Belanja Langsung Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.029.722.630,-

Belanja Langsung Rp. 2.000.000.000,-

Tahun 2014

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.162.562.580,-

Belanja Langsung Rp. 2.089.452.900,-

Tahun 2015

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.282.460.312,-

Belanja Langsung Rp. 21.996.928.900,-

Sumber: Keputusan Bupati Malang No. 188.45/KEP/676/35.07,013/2018

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha instansi akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Instansi yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya, instansi ini tinggal berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Di mana, bagaimana, mengapa, kapan, adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka kembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Apabila pada suatu kesempatan hal ini ditanyakan kepada maka sering didapatkan jawaban bahwa ide-ide untuk kegiatan pada waktu mendatang pada umumnya didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas. Anggaran/Dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Malang digunakan sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi dalam pengelolaan bencana yang dilakukan.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan kepala desa bapak Suwondo yang mengatakan bahwa:

Selama ini keberhasilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dapat secara maksimal dilakukan karena adanya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta yang memiliki kepedulian dalam upaya penanggulan dampak terjadinya bencana.

Adapun menurut Bapak Slamet selaku warga faktor pendukung pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Kami merasakan adanya dukungan secara maksimal terkait dengan upaya pelaksanaan penaggunalangn, pemerintah daerah secara maksimal melakukan upaya tersebut sehingga menjadikan aktivitas penanggulangan dapat secara maksimal dilakukan.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan di Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yaitu ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Masih rendahnya proses koordinasi yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa menjadikan proses pelaksanaan mengalami hambatan. Jadi proses koordinasi menjadi penghambat pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan. Selain itu

kondisi penduduk yang kategori usia yang tua menjadikan proses penanggulangan bencana menjadi terganggu, dimana kemampuan yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan pelaksanaan aktivitas pelaksanaan yang dilakukan.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Malang menurut Bapak Slamet selaku warga yang mengatakan bahwa:

Menurut saya faktor yang menjadi hambatan yaitu sarana dan prasarana yang belum maksimal menjadikan proses pelaksanaan belum secara maksimal dilakukan. Kami belum mendapatkan pelayanan sesuai harapan karena sarana dan prasarana yang ada belum disediakan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu menurut Bapak Supri warga Desa Pandansari memberikan pernyataan mengenai faktor penghambat pelaksanaan strategi dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Menurut saya yang menjadi penghambat karena kondisi masyarakat sendiri dalam hal ini mengenai usia penduduk yang masuk dalam kategori tua, jadi apabila terjadi bencana maka akan mengalami keterlambatan dalam proses evakuasi. Kondisi ini menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan strategi yang ditetapkan. Selain itu dengan banyaknya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan penambang pasir menjadikan proses sosialisasi mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat tersebut belum memiliki kepedulian terhadap keberadaan kondisi lingkungan serta kurang tangggp terjadinya bencana.

Bapak Slamet juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Menurut saya hal yang menghambat dalam pelaksanaan strategi yaitu kurang adanya dukungan dari fasilitas jalan yang terdapat didesa. Kondisi jalan desa yang rusak menjadikan proses evakuasi ketika terjadi bencana mengalami hambatan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat sehingga menjadikan aktivitas pelaksanaan penanggulangan di Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

B. Pembahasan

1. Strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil analisis strategi terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dapat diketahui bahwa terdapat beberapa proses pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga aktivitas pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Beberapa tahapan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang dapat diuraikan sebagai berikut:

Strategi organisasi dimana seluruh potensi yang dimiliki sebagai upaya pengendalian aktivitas pelaksanaan dapat dilakukan secara maksimal sehingga menjadikan potensi dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan. Dalam sistem penanggulangan bencana perlu koordinasi yang intensif. Dalam segi sarana prasarana kita sudah berupaya maksimal dengan potensi yang ada. Dari segi pengetahuan, masyarakat sudah banyak yang paham perihal kebencanaan seperti macam bencana dan cara menyikapinya.

Dari segi aparat, secara berkala sudah dilakukan koordinasi. BPBD juga menyiapkan program gladi, tujuannya untuk menguji kesiapan dalam menghadapi bencana. Meskipun sudah siap siaga, tetapi kita tetap melakukan upaya-upaya konstruktif yang masif dan partisipatif karena memang dalam upaya penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak.

Upaya meminimalisir resiko dan dampak bencana merupakan kewajiban setiap masyarakat. Segala upaya dan sarana yang dapat menghindarkan bencana harus dilakukan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Setiap bencana alam pasti mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi masyarakat di sekitarnya. Apalagi jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang bencana alam. Ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana mengakibatkan besarnya korban jiwa dan kerugian ekonomi setiap terjadi bencana yang terjadi.

Menurut Robbin (1989) dan Bass (1990) untuk mencapai tujuan strategis pengembangan organisasional, tujuan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa langkah operasi dan lalu manajer dapat merencanakan pekerjaan untuk setiap langkahnya. Menurut kecakapan pengembangan, rencana operasi dapat diklasifikasikan menjadi jangka-pendek, jangka-menengah, dan jangka-

panjang. Dalam istilah tujuan perusahaan, indeks operasi setiap tahap dapat dikonfirmasi lalu disebar ke setiap departemen eksekutif. Hal ini akan membentuk pertanggungjawaban departemen dan informasi yang direferensikan dalam penjelasan pekerjaan (Lin, 2007).

Ketepatan ketepatan sasaran Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri dan pelaksanaan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi program yaitu dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang didapat pada kenyataannya. Apabila dalam pelaksanaan ada kekeliruan atau ketidaktepatan yang menghasilkan target dan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka hal itu dikatakan tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Suatu program yang terkait dengan pelaksanaan program evaluasi kebijakan penanggulangan bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Pengukuran strategi pendukung sumber daya manusia dalam pelaksanaan program mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan

menggunakan berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar.

Keberhasilan dalam pendukung sumber daya manusia terkait secara langsung dengan pelaksanaan tentang visi dan arah, berhubungan dengan memfokuskan energi organisasi pada arah tertentu (Veitzhal Rivai, 2003).

Adapun secara umum proses strategi kelembagaan pada umumnya dapat terbentuk dari upaya yang dilakukan sebagai langsung dalam memberikan jaminan pelaksanaan strategi kelembagaan yang ditetapkan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum strategi kelembagaan terkait dengan kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) strategi kelembagaan sebagai fungsi dalam pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh

suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut.

Pelayanan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pula. Responsibilitas dimana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan kinerja birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan. Untuk memahami pelayanan penanggulangan bencana, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang bencana. Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat umum yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Sementara itu, penanggulangan bencana berkaitan erat dengan serangkaian upaya untuk menghindari dan/atau mengurangi akibat yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana.

Peranan pemerintah diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian peranan dalam pemerintah Kecamatan adalah tugas dan wewenang pemerintah Kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu supaya pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (2002: 243) peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya. Dalam peranan evaluasi terkait dengan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang menunjukkan bahwa responsivitas menjadi hal penting dalam mendukung proses pelaksanaan program.

Ketepatan merupakan upaya untuk memberikan dukungan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, kondisi ini terjadi karena adanya beberapa hal yang menyebabkan proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, salah satunya mengenai ketepatan dalam kebijakan. Menurut Winarno (2002: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk

dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Ketepatan dalam evaluasi atau kebijakan penanggulangan bencana dalam pelaksanaan Rehabilitasi - Rekonstruksi bencana akan menjadi tolak ukur atas keberhasilan yang akan dicapai untuk menjalankan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam proses pelaksanaan evaluasi.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Faktor pendukung dalam evaluasi kebijakan penanggulangan bencana pada Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yaitu adanya dukungan kebijakan Pemerintah, meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dan perhatian stakeholder terhadap wilayah bencana

serta adanya agenda rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah berupa simulasi bencana dan edukasi mengenai dampak bencana. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Nurdin Usman, 2002). Jadi keberhasilan dalam pelaksanaan program menjadi salah satu upaya untuk mendukung proses pelaksanaa atau evaluasi atas pelaksanaan program yang dijalankan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu mengenai perbedaan posisi dalam struktur organisasi dalam dinas akan menyebabkan koordinasi antar dinas/instansi menjadi lama. Proses koordinasi yang lama menjadikan aktivitas pelaksanaan atas program belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga prosedur pelaksanaan program dalam berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hambatan juga terjadi karena adanya kondisi usia penduduk yang banyak masuk dalam kategori tua sehingga proses evakuasi ketika terjadi bencana menjadi terhambat atau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat pelaksanaan program, dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai jelas akan memiliki dampak terhambatnya proses pelaksanaan evaluasi program yang dijalankan. Perbedaan pegawai disini yaitu pegawai yang berasal dari berbagai instansi lainnya sehingga membutuhkan suatu

pengelolaan secara tepat sehingga proses pelaksana kebijakan yang akan ditetapkan. Faktor lain yaitu kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap tanggap bencana, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat karena masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang tanggap atas terjadinya bencana. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, dimana kurangnya anggaran dana dalam proses operasional jelas akan menjadikan aktivitas yang dilakukan tidak dapat secara maksimal dilakukan.

Peran kesadaran terhadap pentingnya penanggulangan bencana pada wilayah rawan bencana, adanya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penanggulangan bencana menjadikan proses dalam pengendalian bencana belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan cara pengendalian terjadinya bencana belum dijalankan secara maksimal dan belum terjalinnya komunikasi dengan baik antar instansi dalam proses pengendalian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil; penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penganggulangan bencana berbasis masyarakat oleh pemerintah

Kabupaten Malang terkait dengan strategi oraganisasi dapat diketahui

bahwa selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Malang (BPBD) telah melakukan perencanaan secara tepat terkait dengan

upaya pelaksanaan aktivitas instansi dalam penanggulangan bencana.

Strategi program selama ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan,

dimana pelaksannana program telah dilakukan sesuai dengan prosedur

atau ketentuan yang ditetapkan oleh BPBD dalam rehabilitasi bencana.

Apabila dikaitkan dengan pendukung sumber daya manusia dapat

diketahui bahwa selama ini dukungan sumber daya manusia dari dinas

memberikan jaminan bahwa pelaksanaan program dapat dijalankan

dengan benar. Selanjutnya mengenai strategi kelembagaan yang dilakukan

menunjukkan bahwa telah terbentuk ketepatan dalam penetapan strategi

sehingga program dapat dijlakan dengan benar sesuai prosedur.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak internal dalam evaluasi kebijakan

penanggulangan bencana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana

yakni: 1) Perbedaan posisi dalam struktur organisasi dalam dinas akan

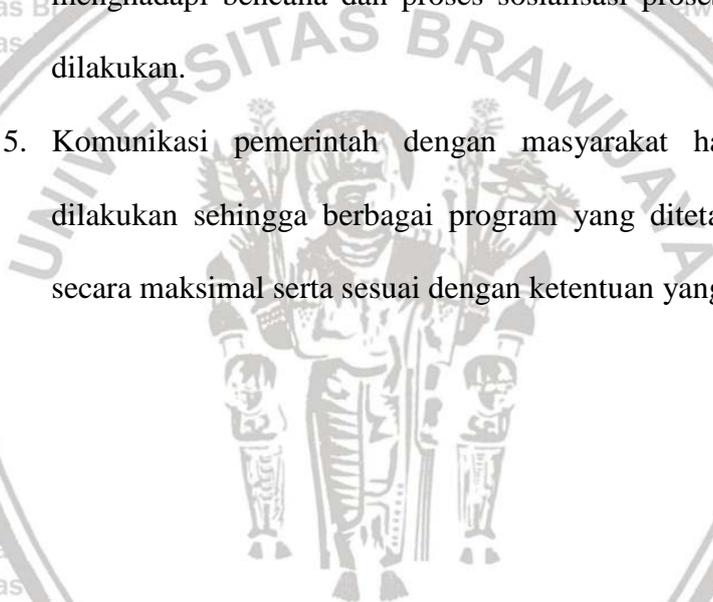
menyebabkan koordinasi antar dinas/instansi menjadi lama 2) Adanya keterbatasan sarana dan prasarana. 3) Kondisi penduduk terkait dengan usia dan pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk. 4) Kurangnya kesadaran sebagai masyarakat terhadap tanggap bencana 5) Kurangnya peran kesadaran terhadap pentingnya penanggulangan bencana pada wilayah rawan bencana. Faktor-faktor pendukung terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang yaitu 1) Motivasi pegawai yang tinggi, 2) Dukungan kebijakan Pemerintah 3) Partisipasi masyarakat dan swasta 4) Perhatian *stakeholder* terhadap wilayah bencana 5) BPBD bidang rehabilitasi-rekonstruksi berperan besar terhadap rehabilitasi-rekonstruksi di wilayah bencana dan 6) Adanya agenda rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah berupa simulasi bencana dan edukasi mengenai dampak bencana.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana maka dukungan dalam upaya untuk peningatan sarana dan prasarana sehingga program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Diharapkan dinas yang terkait selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran sebagai masyarakat terhadap tanggap bencana, upaya ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi.

3. Penetapan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana harus memenuhi kebutuhan atau biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan sehingga proses pelaksanaan Rehabilitasi – rekonstruksi bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan bencana pada wilayah rawan bencana yaitu dengan melakukan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dalam menghadapi bencana dan proses sosialisasi proses tangap bencana yang dilakukan.
5. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus secara maksimal dilakukan sehingga berbagai program yang ditetapkan dapat dijalankan secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Akdon, 2011. *Strategic Management For Educational Management* (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan), Bandung: Alfabeta
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Brecker dalam Heene dkk, 2010. *Manajemen strategis: Konsep*. (Dono Sunardi). Jakarta: Salemba Empat
- Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen & Unwin.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Heene. Aime. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Islamy, M. Irfan, 2007, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta
- Kountur, Ronny, 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Manajemen PPM, Jakarta
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Moch.Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.



Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Nawawi, Hadari. 1983. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Nielsen Media Research, 2009, *Nielsen News Letter*, Edisi 34, <http://www.agbnielsen.com/Uploads/Indonesia/AGBNielsenNewsletterJunInd09.pdf>

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta

Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. 2008. *Manajemen Strategis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Salemba Empat : Jakarta

Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . CV.Alfabeta: Bandung

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer- (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Nurdin Usman, 2002, Konteks implementasi berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru.

Rivai, Veitzal., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.



LAMPIRAN

Interview guide

Wawancara dengan BPBD kabupaten Malang kepala desa Pandansari kecamatan

Ngantang :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?
2. Apakah program riil yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?
3. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana telah sesuai dengan harapan masyarakat?
4. Apakah kebijakan dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?
6. Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
7. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

8. Apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

9. Apakah tolak ukur atas keberhasilan pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Wawancara dengan masyarakat desa Pandansari kecamatan Ngantang :

1. Bagaimana menurut saudara mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?

2. Apa dampak yang saudara rasakan mengenai keberadaan kebijakan tersebut?

3. Apakah pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat telah dilaksanakan secara maksimal di masyarakat?

4. Apa menurut saudara yang menjadikan tidak maskimalnya pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?

5. Bagaimana menurut saudara yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat?

Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 1946 /35.07.207/2019

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor : 6600/UN10.F03.11/PN/2019 tanggal 20 Juni 2019 Perihal Riset/Survey

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Riset/Survey oleh;

Nama / Instansi	: Alfian Rizky F
Alamat	: Jl.MT.Haryono Malang
Thema/Judul/Survey/Research	: <i>Strategi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Oleh Pemerintah Kab.Malang (Studi di Desa Pandansari Kec.Ngantang</i>
Daerah/tempat kegiatan	: di Desa Pandansari Kec.Ngantang Kab.Malang

Lamanya	: 2 (Dua) Minggu
Pengikut	: -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 20 Juni 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG



GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19740326 199311 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Kepala BPBD Kab.Malang
3. Camat Ngantang
4. Kepala Desa Pandansari Kec.Ngantang Kab.Malang
5. Mhs/Ybs
6. Arsip





CURRICULUM VITAE

NAMA : ALFIAN RIZKI F
NIM : 125030107111115
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : PONOROGO, 28 JANUARI 1994
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM

PENDIDIKAN

1. TK PSM TAKERAN KABUPATEN MAGETAN
2. MI ISLAMIAH 01 KOTA MADIUN
3. SMP 10 KOTA MADIUN
4. SMA 4 KOTA MADIUN

